



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

JALAN RAYA BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, PADANG PARIAMAN 25586
TELEPON (0751) 819109, 819090, FAKSIMILE (0751) 819109
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK skipm.padang@kkp.go.id

Yth. Sekretariat BPPMHKP
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16
Di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.348/SKIPM.PDG/TU.210/X/2025

No	Naskah dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1.	Bersama ini kami kirimkan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025	1 (satu) rangkap	Untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima,
Nama Jabatan :

Padang Pariaman, 15 Oktober 2025
Pengirim,
Plt. Kepala Stasiun KIPM Padang,

Tanda tangan dan Cap

Nama Lengkap:

Ira Susanti

Diterima Tanggal :

No. HP :



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III
TAHUN 2025

**SKIPM
Padang**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2025 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Padang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun KIPM Padang.

Padang, 3 Oktober 2025

Plt. Kepala,



Rini Sardi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi	2
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
2.4. Pengukuran Kinerja	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.1.1. Capaian Kinerja Triwulan III	11
3.1.2. Perbandingan Realisasi dengan Triwulan III Tahun 2024	49
3.1.3. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan	50
3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	53
3.1.5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja	54
3.2. Realisasi Anggaran	55
BAB IV. P E N U T U P	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Rekomendasi	56
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Padang Triwulan III Tahun 2025	8
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025	12
Tabel 3.2.	Data Unit Usaha yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Sektor Produksi Primer lingkup Stasiun KIPM Padang sampai dengan Triwulan III tahun 2025	16
Tabel 3.3.	Data Sertifikasi CPIB Kapal lingkup Stasiun KIPM Padang sampai dengan Triwulan II (Semester I) tahun 2025	18
Tabel 3.4.	Data Sertifikasi HACCP Triwulan III Tahun 2025	25
Tabel 3.5.	Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan Triwulan III Tahun 2025	25
Tabel 3.6.	Rincian lokus dan jenis sampel kegiatan Inpres 01 Semester I Tahun 2025	28
Tabel 3.7.	Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025	32
Tabel 3.8.	Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	45
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2023	49
Tabel 3.10.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan	51
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang	3
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis SKIPM Padang Tahun 2025	7
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan III Tahun 2025	11
Gambar 3.2.	Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi CPIB Kapal sampai dengan Triwulan III Tahun 2025	19
Gambar 3.3.	Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi SKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	26
Gambar 3.4.	Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Semester I Tahun 2025 di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang	29
Gambar 3.5.	Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Semester I Tahun 2025 di Mall Suzuya Stasiun Padang	30
Gambar 3.6.	Foto dokumentasi kegiatan penerbitan SMHKP Triwulan III Tahun 2025	33
Gambar 3.7.	Nilai rekomendasai hasil pengawasan Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi SIDAK	43
Gambar 3.8.	Nilai SKM Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 pada e-survey SKM BPPMHKP	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang selama Triwulan III Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang hingga akhir Triwulan III dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada awal Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan III Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang telah menetapkan target kinerja Triwulan III Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Padang dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Padang yang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum, Stasiun KIPM Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan III Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Padang pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 100%, capaian 120%;
 - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 99%, realisasi 100%, capaian 101%;
2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 75%, realisasi 88,24%, capaian 118%;
 - b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A).
3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - b. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - c. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
 - d. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);

- e. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Satker Stasiun KIPM Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
- f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang target 85, realisasi 100, capaian 118%;
- g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang target 76, realisasi 100, capaian 120%;
- h. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran (N/A);
- i. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang target 88, realisasi 96,6, capaian 110%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Triwulan III Tahun 2025 dengan 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Padang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Padang pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Padang dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Padang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan III Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Padang serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Padang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Profil Organisasi

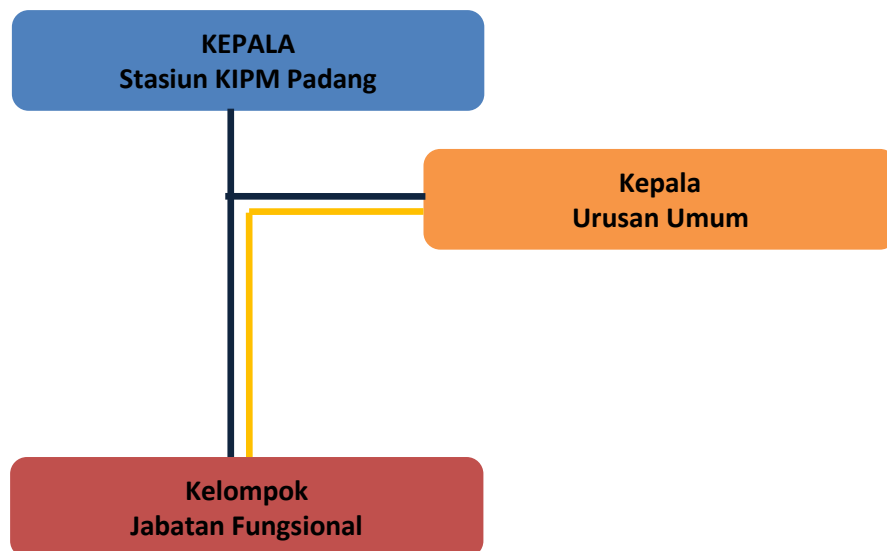
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Padang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Stasiun KIPM Padang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;

6. Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2025 Stasiun KIPM Padang mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga belas) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Padang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2025.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Padang sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Padang.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis SKIPM Padang Tahun 2025

Peta strategis Stasiun KIPM Padang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kapala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai Seluruh KIPM Padang. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Padang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Padang Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025	Target Tw-3
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	--
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	--
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	99
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	--
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	--
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	--
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	--
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	87	--
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	--

		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	--
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	88	88

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indiktor Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

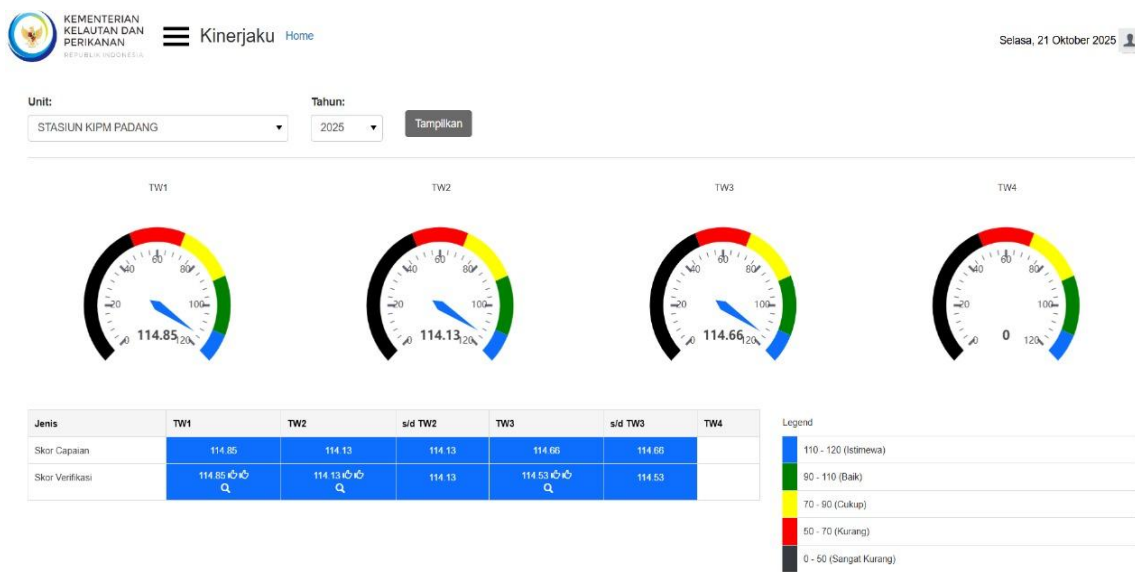
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Kinerja Triwulan III

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang sebesar 114,66% (kategori sangat baik).



Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan III Tahun 2025

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus

keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	--	--	--
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	70	100	120
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	--	--	--
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	99	100	101
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	75	88,7	118

	kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	--	--	--
SK 3	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup UPT. Stasiun KIPM Padang	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	--	--	--
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	--	--	--
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	--	--	--
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	87	--	--	--
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	--	--	--
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	85	100	118
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	76	100	120
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	--	--	--
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	88	88	96,6	110

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan III Tahun 2025

adalah Sangat Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 4 (empat) indikator kinerja yakni :

- 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 3) Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi); dan
- 4) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%).

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI),
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi terhadap kapal yang menajukan sertifikasi CPIB Kapal dalam sistem OSS maupun secara manual.

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Target Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang pada, dimana pengukuran capaian IK ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu pada Semester I dan Semester II. Perhitungan capaian berdasarkan persentasi realisasi dari 6 kegiatan sertifikasi (unsur pembentuk) di sektor Produksi Primer yang meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB di Kapal. Adapun perhitungan masing-masing dari unsur pembentuk adalah persentase

antara sertifikat penerapakan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Sektor Produksi Primer dibandingkan dengan kegiatan inspeksi yang dilaksanakan.

Pada Triwulan III tahun 2025 ini pada Stasiun KIPM Padang tidak ada target yang ditetapkan sehingga realisasinya masih berdasarkan realisasi Semeseter I. Dengan demikian capaian IK ini tidak dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang	70	--	--	--

Capaian tersebut di dapatkan berdasarkan sertifikasi yang telah dilaksanakan pada Unit Usaha yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan Pangan (SMKP) Sektor Produksi Primer lingkup Stasiun KIPM Padang sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Data Unit Usaha yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Sektor Produksi Primer lingkup Stasiun KIPM Padang sampai dengan Triwulan II tahun 2025

Standar Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (a)	Jumlah inspeksi yang dilakukan (b)	Persentase Unit Usaha yang menerapkan SMKP (a/b x 100%)
CBIB	0	0	Nihil
CPIB	0	0	Nihil
CPPIB	0	0	Nihil
CPOIB	0	0	Nihil
CDOIB	0	0	Nihil
CPIB Kapal	6	6	100

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Padang, dihitung menggunakan rumus :

$$\% X = \frac{100\%}{1} = 100 \%$$

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Padang pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 13 orang yang terdiri dari :

1. Inspektur mutu ahli muda 5 orang
2. Asisten inspektur mutu mahir 1 orang
3. Pranata komputer mahir 1 orang
4. Pranata komputer P3K 1 orang
5. PPNPN 7 orang
6. PJLP 1 orang

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah :

1. Sertifikasi mutu produksi primer merupakan tuis baru di BPPMHKP yang sebelumnya adalah BKIPM;
2. Kurangnya ketersediaan SDM (inspektur mutu) di BPPMHKP Padang, baik dari sisi kualitas dan ataupun kuantitas;
3. Pemahaman pelaku usaha terkait sertifikasi mutu produksi primer belum optimal;
4. Sinergitas antar instansi yang terlibat didalam sertifikasi mutu produksi primer belum optimal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penerbitan sertifikat CPIB Kapal pada Semester I Tahun 2025 ini adalah :

1. Pada tanggal 12 Mei 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB kapal penangkap ikan tuna MNK 04
2. Tanggal 13 Mei 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB kapal penangkap ikan tuna Kevin Jaya 01
3. Tanggal 29 Mei Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB kapal penangkap ikan

tuna LLB 032

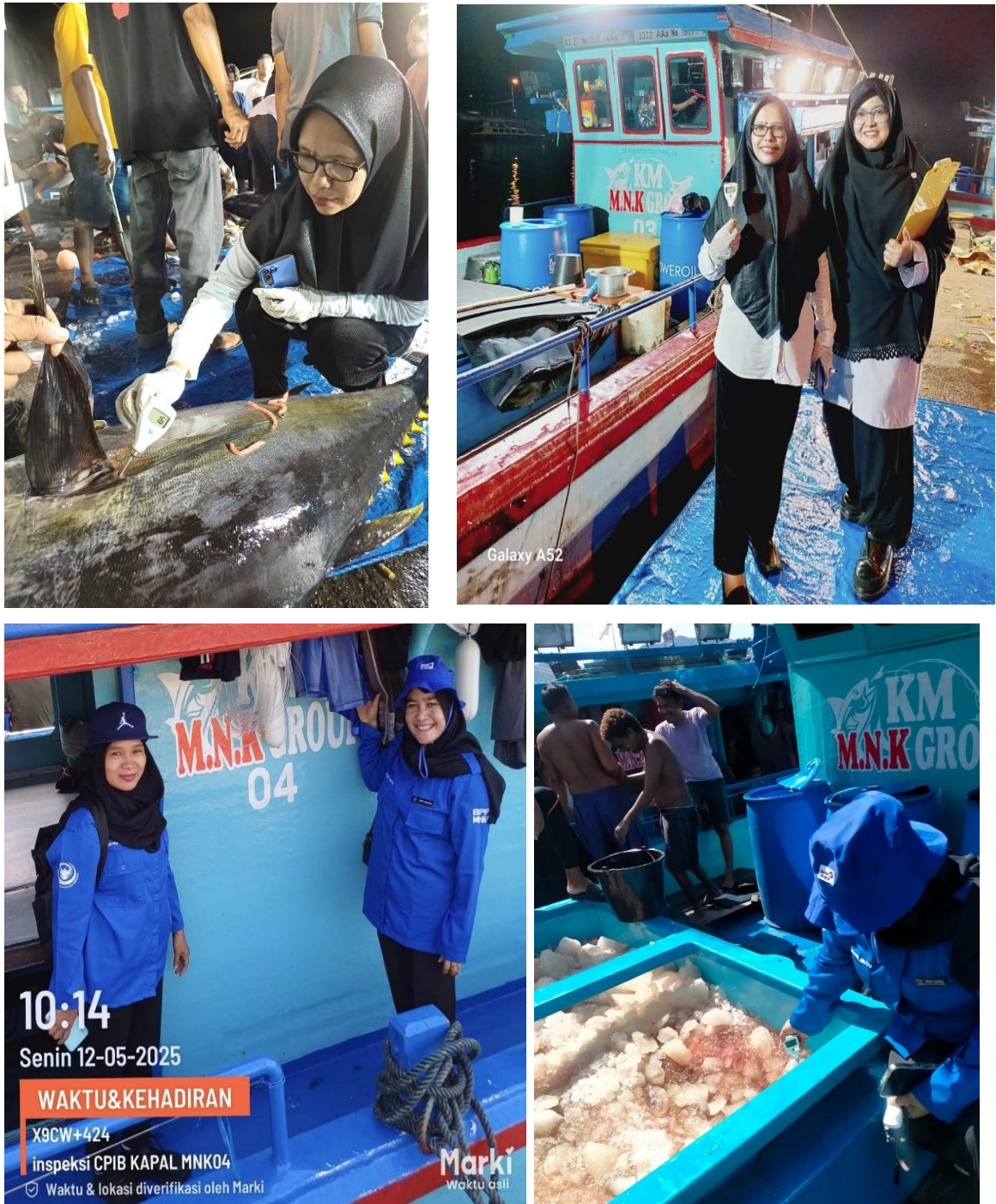
4. Tanggal 1 – 2 Juni 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB kapal penangkap ikan tuna MNK 01, MNK 02, dan MNK 03
5. Pada tanggal 5 Juni 2025 dilakukan kunjungan lapang dalam rangka percepatan sertifikasi CPIB pada UPR David Koto dan UPR Kajai Fish Farm di Kota Pariaman Bersama dengan Tim dari Bidang Budidaya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman serta Tim Penyuluh Perikanan.
6. Pada tanggal 30 Juni 2025 diselenggarakan Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Mutu Produksi Primer secara daring.

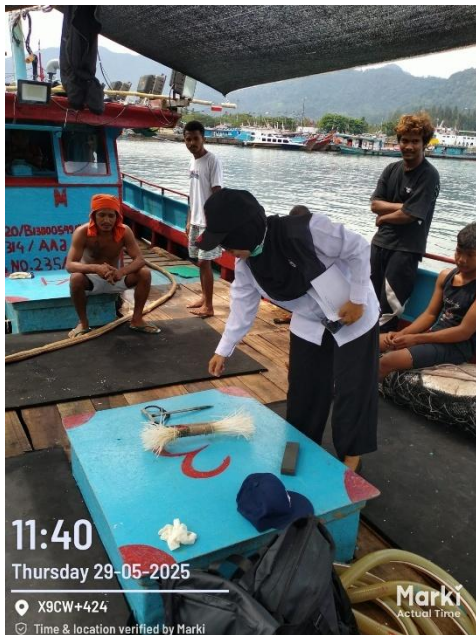
Adapun Kapal Perikanan yang telah diterbitkan sertifikat CPIB Kapal sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (Semester I) lingkup Stasiun KIPM Padang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Data Sertifikasi CPIB Kapal lingkup Stasiun KIPM Padang sampai dengan Triwulan II tahun 2025

No	Tanggal	Pelaku usaha	Tipe Kapal	Jenis Produk	Ukuran Kapal (GT)	Grade
1.	26 Mei 2025	KM. MNK Group 04	Kapal Penangkap	Tuna segar	30 GT	C
2.	26 Mei 2025	KM. Kevin Jaya 01	Kapal Penangkap	Tuna segar	10	C
3.	11 Juni 2025	KM. MNK Group 02	Kapal Penangkap	Tuna segar	21	C
4.	11 Juni 2025	KM. LLB 032	Kapal Penangkap	Tuna segar	20	C
5.	11 Juni 2025	KM. MNK Group	Kapal Penangkap	Tuna segar	18	C
6.	11 Juni 2025	KM. MNK Group 03	Kapal Penangkap	Tuna segar	27	C

Gambar 3.2. Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi CPIB Kapal sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2025





IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT lingkup Stasiun KIPM Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon I lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Serifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Permohonan penerbitan sertifikat HACCP dapat berupa :

1. Permohonan baru, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI/pelaku usaha baru yang belum memiliki sertifikat HACCP.
2. Permohonan perpanjangan, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP untuk perpanjangan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya.
3. Permohonan penambahan ruang lingkup, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI yang akan menambah ruang lingkup produk
4. Permohonan peninjauan ulang, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;

3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

Pada Triwulan III tahun 2025 dari target kinerja yang ditetapkan 70% realisasinya 100%, sehingga capainnya 120%. Hal ini berdasarkan pada realisasi

penerbitan sertifikat HACCP 100% dan realisasi persentase SKP yang diterbitkan 100% dengan perhitungan :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	70	100	120%

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi/verifikasi SKP dan Inspeksi dalam rangka penerapan HACCP pada Triwulan III tahun 2025 sebanyak 5 orang yang merupakan Inspektur Mutu yang terdiri dari :

1. Inspektur mutu ahli muda 3 orang
2. Inspektur mutu ahli pertama 1 orang
3. Asisten inspektur mutu mahir 1 orang

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas KKP adalah dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perikanan serta nilai ekspor. BPPMHKP memastikan bahwa produk perikanan yang diekspor mempunyai jaminan mutu dan mampu bersaing dan diterima di pasar internasional.

Permasalahan yang ada dalam pencapan target IK ini antara lain :

1. Terdapat ruang lingkup produk yang tidak mempunyai KBLI
2. Surat tugas dari pusat seringkali terlambat setelah rekomendasi dari dinas terkait, sehingga berimplikasi ke janji layanan.
3. Pelaku usaha tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sehingga Dinas tidak merekomendasikan penerbitan SKP

Adapun tindakan yang telah dilakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah :

1. Koordinasi dengan dinas perikanan Kab/Kota dan pusat mutu terkait KBLI yang digunakan.
2. Koordinasi dengan pusat mutu pasca panen terkait surat tugas yang belum terbit setelah adanya rekomendasi dari dinas perikanan propinsi.
3. Menyampaikan kepada pelaku usaha untuk menindaklanjuti temuan dan melakukan perbaikan.

Persentase penerbitan sertifikat HACCP adalah 100% sesuai dengan jumlah ruang lingkup inspeksi dimana pada Triwulan III ini tidak ada ditargetkan 0 ruang lingkup inspeksi dan terealisasi 0 ruang lingkup HACCP, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Data Sertifikasi HACCP Triwulan III Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat
1.	--			

Sementara Persentase penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah **100 %**, sesuai dengan jumlah rekomendasi penerbitan SKP dari instansi pembina (Dinas Kelautan dan Perikanan) sebanyak 3 pelaku usaha dan telah dilakukan verifikasi/inspeksi dimana dinilai memenuhi syarat telah diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 3 pelaku usaha.

Tabel 3.5. Daftar Sertifikat Kelayakan Pengolahan Triwulan III Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat
1.	Rendang Ega	Rendang tuna	B	38287/13/SKP/LN/VIII/2025 Tanggal 4 Agustus 2025
2.	Kinanti	Keripik ikan	B	38619/13/SKP/LN/VIII/2025 Tanggal 20 Agustus 2025
3.	PT Lintas Laut Samudera	Fresh tuna	B	39512/13/SKP/SG/IX/2025 Tanggal 29 September 2025

Gambar 3.3. Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi SKP Triwulan III Tahun 2025



IK3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Adapun cara pengukurannya adalah :

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada Stasiun KIPM Padang tahun 2025 dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan semester II di Kota Padang dengan lokus Pasar Lubuk Buaya, Pasar Modern Mall Suzuya Stasiun Padang.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan, dilakukan Pembentukan Tim Daerah Pelaksana Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Tim Inpres 01/2017) Tahun 2025 dengan melibatkan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
2. Balai Besar POM Padang
3. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
4. Dinas Kesehatan Kota Padang
5. Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Padang
6. Perguruan Tinggi (Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Bung Hatta)
7. UPTD Pasar Lubuk Buaya
8. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Padang.

Walaupun pada Triwulan III belum ada target yang ditetapkan, namun sesuai juknis kegiatan pengawasan/monitoring semester I (tahap I) harus dilaksanakan pada bulan Maret. Oleh karena itu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah monitoring ke lapangan pada tanggal 19-20 Maret 2025.

Tabel 3.6. Rincian lokus dan jenis sampel kegiatan Inpres 01 Semester I Tahun 2025

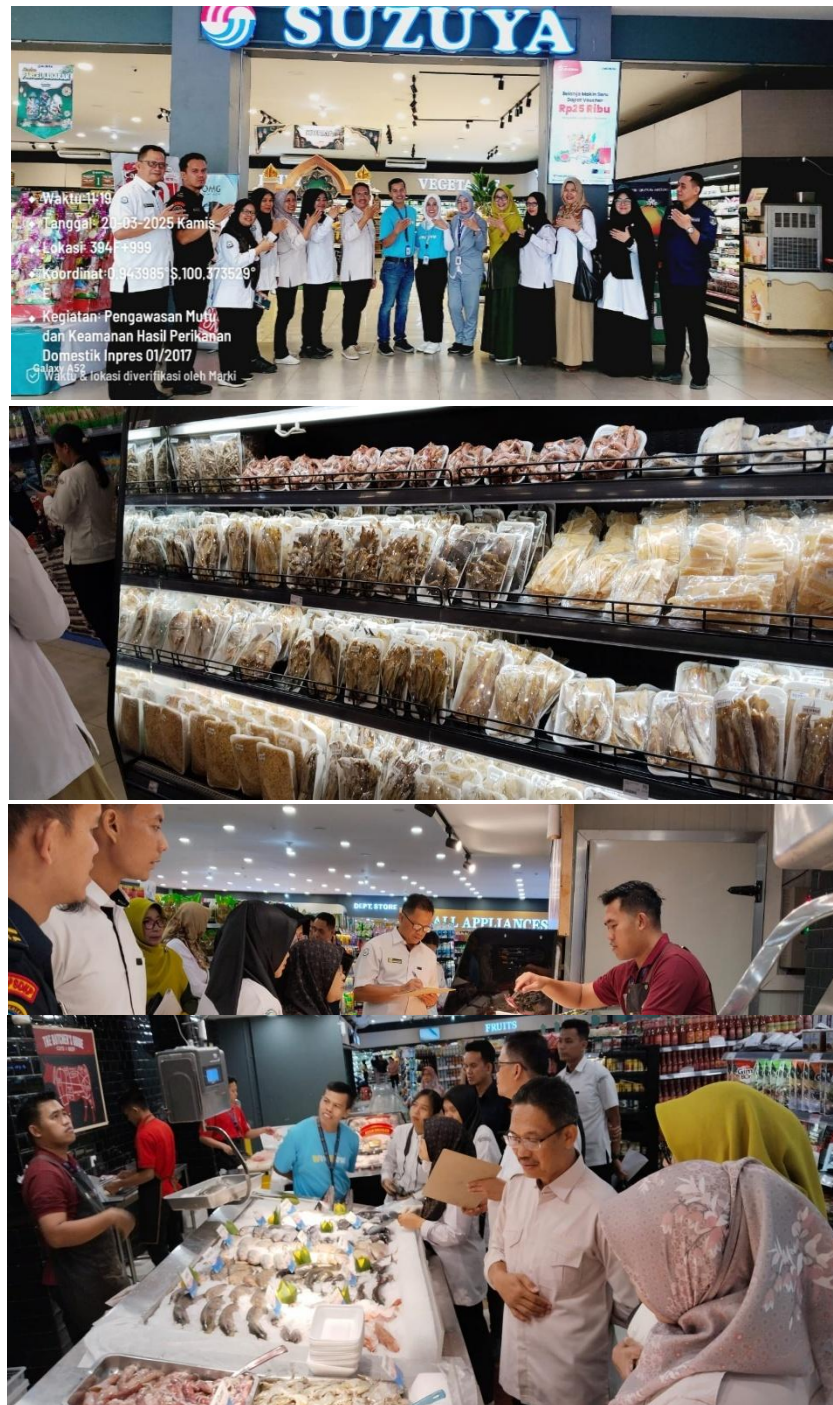
No	Lokus	Jenis sampel
1	Pasar Lubuk Buaya	Ikan cakalang, Ikan kembung, ikan layang, ikan asin, cumi asin
2	Mall Suzuya Stasiun Padang	Ikan kembung, belut segar, dan ikan asin

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	--	--	N/A

Gambar 3.4. Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Semester I Tahun 2025 di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang



Gambar 3.5. Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Semester I Tahun 2025 di Mall Suzuya Stasiun Padang



IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 33 tahun 2024 tentang pengeluaran hasil perikanan dari wilayah Republik Indonesia merupakan dasar dalam penerbitan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). SMKHP diwajibkan untuk pengeluaran produk perikanan baik konsumsi maupun non konsumsi. SMKHP hasil perikanan konsumsi diterbitkan untuk:

1. Ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat CBIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan pengawasan mutu
2. Ikan hidup yang berasal dari unit usaha yang memiliki sertifikat CPIB dengan peringkat minimal baik dan telah dilakukan pengawasan mutu.
3. Unit Usaha yang memiliki sertifikat penerapan HACCP dan telah dilakukan pengawasan mutu.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cara pengukuran :

$$\%X = \frac{A-B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan *)

*) Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan

Tabel 3.7. Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025

Bulan	Negara Tujuan	Frekwensi Ekspor (Jumlah HC terbit)	Jumlah HC yang ditolak
Juli	Jepang	1	0
	Malaysia	2	0
Agustus	Jepang	1	0
	Malaysia	1	0
September	Jepang	1	0
	Malaysia	2	0
Jumlah		8	0

Capaian IK Rasio ekspor dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Padang, dihitung menggunakan rumus :

$$\%X = \frac{A+B}{A} \times 100\%$$

$$\% \text{ IKU} = \frac{8 - 0}{8} \times 100 = 100 \%$$

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	99	100	101

Gambar 3.6. Foto dokumentasi kegiatan penerbitan SMHKP Triwulan III Tahun 2025



Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan III Tahun 2025 adalah Sangat Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yakni:

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk nilai berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control*. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara pengukuran rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausul dalam ISO 17025 yang terverifikasi :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Target Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang tahun 2025 ditetapkan 70. Laboratorium Uji Stasiun KIPM Padang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2015 oleh lembaga akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga penerapan sistem manajemen mutu laboratorium harus dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ISO/IEC 17025.

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium diperoleh berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu – BPPMHKP terhadap UPT BPPMHKP yang ditunjuk, dimana nilai hasil verifikasi tersebut dipergunakan sebagai dasar capaian IK ini untuk seluruh UPT BPPMHKP. Pada Triwulan III tahun 2025 Stasiun KIPM Padang menetapkan target 75, sementara realisasinya 88,24, sehingga nilai capaian IK ini adalah 117,7% (118%).

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	75	75	88,24	118

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga Inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Cara pengukuran :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, ..., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada Triwulan III tahun 2025 ini tidak ada target sehingga tidak dilakukan pengukuran.

Sasaran Kegiatan 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja BKIPM pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran kegiatan Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 2) Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 3) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 4) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks);
- 5) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Satker Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 7) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 8) Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Persen);
- 9) Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai).

IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian kinerja untuk IK Indikator IKPA UPT Stasiun KIPM Padang mengadopsi hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Target IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 ditetapkan 92 dan pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II. Pada Triwulan III tidak ada target yang ditetapkan sehingga tidak dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	--	--	--

IK8. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi

dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target akhir tahun anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara mengukur capaian Indikator Kinerja pada IK ini adalah dengan mengambil data dari Aplikasi MONEV KEMENKEU pada Smart DJA. Target indikator kinerja Nilai kinerja pelaksanaan anggaran UPT Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2025 adalah 71,5 dimana pengukuran capaian dilakukan akhir tahun. Dengan demikian pada Triwulan III ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	--	--	N/A

IK9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Temuan atas hasil audit pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. LHP

BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran pengelolaan keuangan dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Pengukurannya :

$$\%X = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan adalah 100%. Pengukuran capaian kinerja dilakukan akhir tahun sehingga capaian IK pada Triwulan III ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	--	--	N/A

IK10. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: pendidikan S3, S2, S1, D3, D1, SLTA sederajat dan dibawah SLTA
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam (JP) satu tahun terakhir, seminar/Workshop/ konferensi/setara satu tahun terakhir.
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi SKP dan Prilaku Kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Untuk Satker Stasiun KIPM Padang ditetapkan target Tahun 2025 sebesar 87. Pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II. Pada Triwulan III tidak ada target yang ditetapkan sehingga tidak dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indek)	87	--	--	--

IK11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Satker Stasiun KIPM Padang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi

kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Cara Pengukurannya :

1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I
2. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

Pada Tahun 2025 Satker Stasiun KIPM Padang memiliki target nilai SAKIP sebesar 86. Pengukuran capaian kinerja dilakukan akhir tahun sehingga capaian IK pada Triwulan III ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Satker Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	--	--	N/A

IK12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (Status Tindak Lanjut adalah TUNTAS) oleh Stasiun KIPM Padang yang menjadi objek pengawasan.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP kepada BPPMHKP berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Padang merupakan persentase perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP dengan rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT.

Penghitungan capaian :

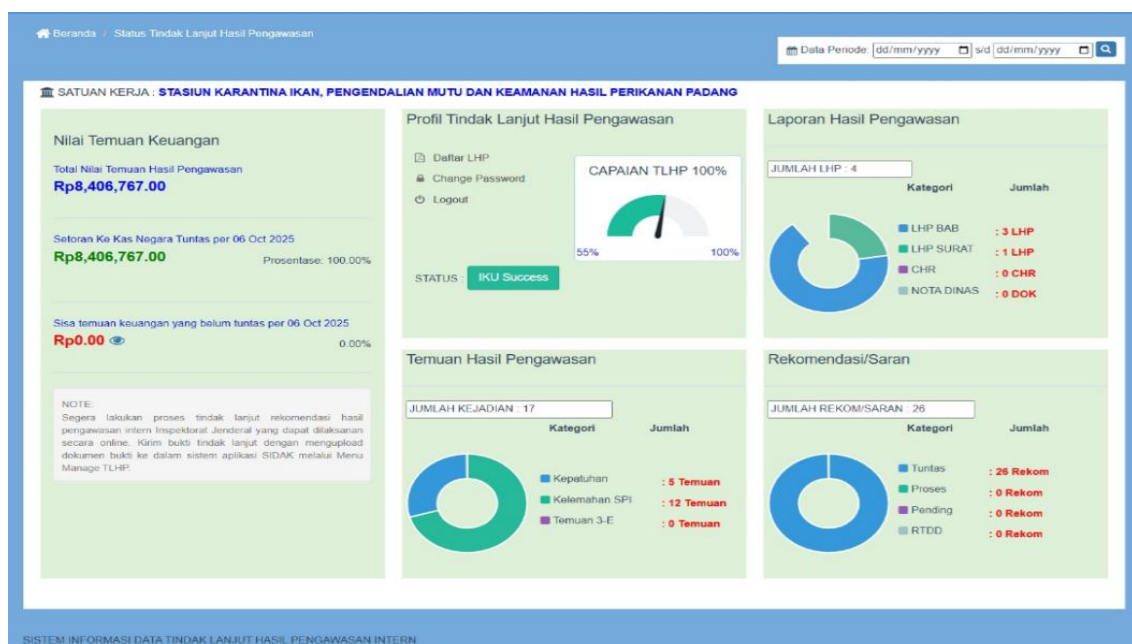
$$\%X = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
 $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Triwulan III Tahun 2025 target yang ditetapkan adalah 85%. Berdasarkan data aplikasi SIDAK Stasiun KIPM Padang pada Triwulan III ini telah memanfaatkan seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP guna perbaikan kinerja UPT. Dengan demikian dari target 85% realisasinya 100% sehingga capaiannya 118%.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	85	100	118

Gambar 3.7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 pada Aplikasi SIDAK



IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang menggunakan rumus sebagai berikut

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan di SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemegang akun KPA dan PPK
2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA-KL

- Mengupload ke dalam aplikasi SIRUP rencana umum pengadaan barang dan jasa lingkup UPT Stasiun KIPM padang

Pada Triwulan III ini BPPMHKP (eselon 1) mendapatkan nilai sebesar 99.06 dengan target 76 % sehingga capaian menjadi 120 % hal ini dapat dilihat pada aplikasi SIRUP pada Biro Umum dan PBJ serta Nota Dinas Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, Dimana data yang diambil berdasarkan nilai dari Eselon 1 BPPMHKP bukan data dari masing-masing UPT, hal ini dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 3.8. Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP)			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		TW-3			TW3				
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
1	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	23,133,112,424	373,548,000	23,506,660,424	-	100.00%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	2,892,982,000		2,892,982,000	2,892,982,000		2,892,982,000	-	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKAPAN	454,583,300		454,583,300	454,583,300		454,583,300	-	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324		945,341,324	945,341,324		945,341,324	-	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	2,045,141,000		2,045,141,000	2,045,141,000		2,045,141,000	-	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	226,766,000		226,766,000	226,766,000		226,766,000	-	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000		190,000,000	190,000,000		190,000,000	-	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	-	58,810,000	58,810,000	-	58,810,000	58,810,000	-	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	658,352,000		658,352,000	658,352,000		658,352,000	-	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000		768,055,000	768,055,000		768,055,000	-	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	744,295,000		744,295,000	744,295,000		744,295,000	-	100.00%

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	76	100	120

IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: **Nilai Pengungkit** yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan **Nilai Hasil** yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)
- f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada Tahun 2025 Satker Stasiun KIPM Padang memiliki target sebesar 70%. Pengukuran capaian kinerja dilakukan akhir tahun sehingga capaian IK pada Triwulan III ini belum dilakukan pengukuran.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Persen)	70	--	--	--

IK15. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei

Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

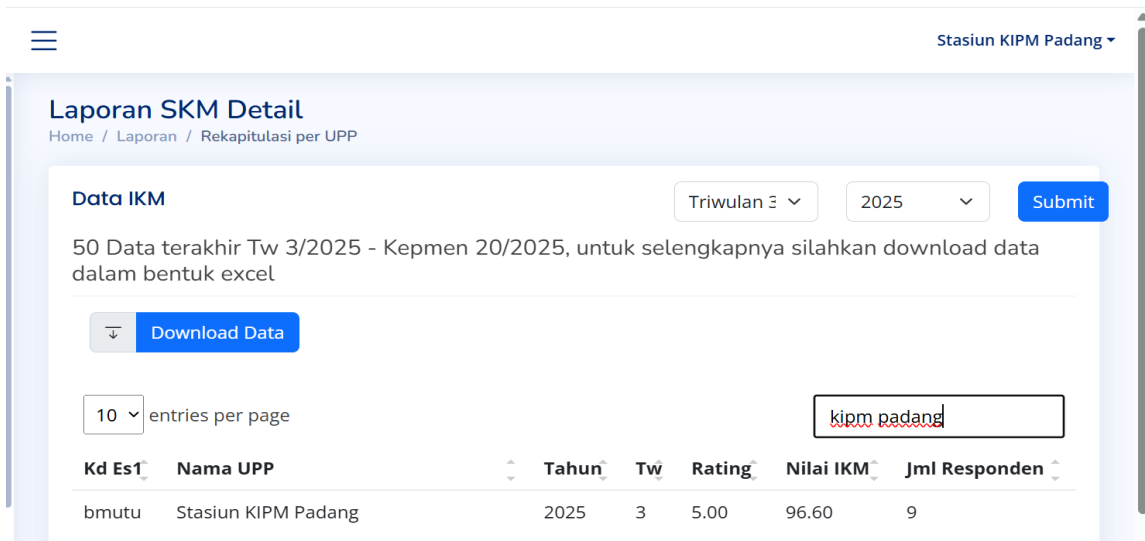
$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Pada Triwulan III Tahun 2025 nilai IKM Stasiun KIPM Padang adalah 98,60 dari target 88 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian kinerja IK ini adalah 109,8%.

Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	Capaian %
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	88	88	98,60	110



Stasiun KIPM Padang

Laporan SKM Detail

Home / Laporan / Rekapitulasi per UPP

Data IKM Triwulan 3 2025 Submit

50 Data terakhir Tw 3/2025 - Kepmen 20/2025, untuk selengkapnya silahkan download data dalam bentuk excel

Download Data

10 entries per page kipm padang

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bmutu	Stasiun KIPM Padang	2025	3	5.00	96.60	9

Gambar 3.8. Nilai SKM Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 pada e-survey SKM BPPMHKP

3.1.2. Perbandingan Realisasi dengan Triwulan III Tahun 2024

Secara umum seluruh target kinerja Stasiun KIPM Padang pada periode Triwulan III tahun anggaran 2024 dan Triwulan III tahun anggaran 2025 tercapai sesuai dengan rencana dan berhasil dengan baik. Capaian kinerja sesuai dengan semua target yang telah diteapkan untuk Triwulan III dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Padang dan telah sesuai dengan kemampuan SDM serta pagu anggaran yang diberikan. Dalam hal pemanfaatan anggaran, sebagian besar telah dilaksanakan secara efisien. Capaian kinerja ini telah sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Stasiun KIPM Padang.

Dilihat dari dari dashboard aplikasi Kinerjaaku, capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025 meningkat dibanding capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dimana pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar 114,66, sedangkan Triwulan III Tahun 2024 sebesar 113,41. Hasil perbandingan capaian kinerja Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Triwulan III Tahun 2024 dengan secara rinci dapat dilihat Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024

No IKU	Indikator Kinerja	Target TW-3 Tahun 2024	Realisasi TW-3 Tahun 2024	Target TW-3 Tahun 2025	Realisasi TW-3 Tahun 2025	Naik/ Tetap/ Turun
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	N/A
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	70	100	N/A
3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	--	--	--	--	N/A

4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	99	100	N/A
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	75	88,24	N/A
6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	--	N/A
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	--	N/A
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	--	N/A
9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	N/A
10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	--	--	--	--	N/A
11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	--	N/A
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	80	100	85	100	Tetap
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	76	100	N/A
14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	--	N/A
15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	84	99,31	88	96,60	Turun

3.1.3. Perbandingan Realisasi dengan Target Tahunan

Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun anggaran. Target Kinerja Stasiun KIPM Padang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Padang dan Kepala BPPMHKP. Indikator yang tercantum dalam perjanjian kinerja akan menyesuaikan dengan arahan dan kebijakan pimpinan dalam hal ini

Kepala BPPMHKP. Analisis terhadap akuntabilitas kinerja Stasiun KIPM Padang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penjelasan keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis Akuntabilitas Kinerja merupakan analisis efisiensi dan efektifitas dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu dan juga menjelaskan mengenai manfaat lain yang dapat ditimbulkan oleh suatu kegiatan. Secara umum, dalam hal melakukan perbandingan capaian kinerja Triwulan III dengan Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Padang.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2025. Pada Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Padang, ada beberapa IK yang pengukuran dilakukan secara semesteran maupun tahunan. Pada Triwulan III ini sebagai triwulan terakhir pengukuran capaian IK seluruhnya telah terealisasi dalam rangka mendukung capaian kinerja organisasi. Untuk menilai keberhasilan capaian IK tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut.

Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III dengan Target Tahunan

No IKU	Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW-3	Realisasi TW-3	% Thd Target Tahunan
1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	--	--	N/A
2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	70	100	120
3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	--	--	N/A

4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	99	100	101
5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	75	88,24	118
6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	--	--	N/A
7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	--	--	N/A
8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	--	--	N/A
9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	--	--	N/A
10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	87	--	--	N/A
11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	--	--	N/A
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	85	100	118
13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	76	100	120
14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	--	--	N/A
15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	88	88	96,60	110

3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang sebesar 114,66% (kategori sangat baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu

tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja untuk IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang mencapai 120% adalah karena kinerja dari Inspektur Mutu yang ada pada Stasiun KIPM Padang serta kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan. Keberhasilan ini juga karena adanya koordinasi yang baik antara Stasiun KIPM Padang dengan instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat maupun ditingkat Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan.

Faktor penyebab keberhasilan IK Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, tindak terlepas dari baiknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa oleh personil SKIPM Padang selama ini. Stasiun KIPM Padang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa/masyarakat senantiasa mengacu kepada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pada Sasaran Kegiatan 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan faktor penyebab keberhasilan capaian IK adalah adanya upaya dalam pemeliharaan dan meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan/pelatihan/bimtek/webinar dan lainnya yang dilaksanakan secara daring maupun tatap muka langsung. Dengan meningkatnya kompetensi ASN diharapkan target Nilai Indeks Profesionalisme ASN dapat tercapai, sekaligus juga penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan juga jauh lebih baik.

3.1.5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun KIPM Padang terdapat dua program yang merupakan cascading dari Unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Program tersebut yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdapat dua kegiatan yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan Manajemen Mutu. Sementara pada Program Dukungan Manajemen terdapat satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sampai dengan Triwulan III ini berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja IK yang ada pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri maupun Program Dukungan Manajemen dapat mencapai target bahkan beberapa IK capaiannya melebihi target (capaian IK >100%). Keberhasilan capaian kinerja IK pada Program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tidak terlepas dari Capaian kinerja IK pada Program Dukungan Manajemen, begitu juga sebaliknya.

Capaian IK pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang capainnya 120% yaitu IK2 : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, karena ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen berupa pengelolaan dan penyediaan ASN yang professional, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran yang baik. Begitu juga sebaliknya capaian IK pada Program Dukungan Manajemen sebagaimana terlihat pada IK 12: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Padang capaian 118, karena kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan dengan baik sesuai rencana aksi.

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di Stasiun KIPM Padang Triwulan III Tahun 2025 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Padang. Secara keseluruhan pada tahun 2025 Stasiun KIPM Padang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.353.749.000, berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-032.13.2.567432/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Stasiun KIPM Padang telah melaksanakan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2025 sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Padang sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	35.860.000	25.461.405	71,00
SK2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	89.580.000	47.287.000	52,79
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.275.109.000	2.054.416.993	62,73
	TOTAL ANGGARAN	3.400.549.000	2.127.165.398	62,55%

Stasiun KIPM Padang pada Triwulan III Tahun 2025 mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 2.127.165.398,- atau sebesar 62,55% dari total Anggaran Tahun 2025 (setelah revisi) sebesar Rp. 3.400.549.000,-



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Padang dilakukan terhadap 3 (Tiga) Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Padang telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IK capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja tahunan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, untuk memastikan capaian Indikator Kinerja direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk capaian IKK pada Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar perlu rencana aksi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kab/Kota dan Propinsi Sumatera Barat, UPT KKP terkait, penyuluh perikanan.
 - b. Senantiasa melakukan penyebarluasan informasi khususnya terkait tugas dan fungsi baru yaitu penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - c. Menyelenggarakan Program Help Desk Percepatan Sertifikasi Mutu Produksi Primer khususnya CPIB dan CBIB secara berkala.
 - d. Meningkatkan kompetensi Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu.

2. Untuk capaian IKK pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan perlu rencana aksi :
 - a. Diperlukan peningkatkan pemahaman Operator SIDAK dan Operator SIRUP melalui diskusi/pelatihan/sharing session.
 - b. Menyusun jadwal tetap dan batas waktu penyusunan RUP,
 - c. Tim perencanaan PBJ harus memastikan seluruh kegiatan yang memerlukan pengadaan sudah direncanakan dan diumumkan.
 - d. Sinkronkan data rencana kegiatan di RKA/DIPA dengan rencana pengadaan.
 - e. Petugas layanan memberi penjelasan singkat kepada pemohon sebelum diminta mengisi kuesioner, sampaikan ke publik bahwa masukan mereka ditindaklanjuti, tampilkan hasil SKM di ruang layanan, website, dan sosial media UPT dan Update nilai SKM minimal setiap triwulan.



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG**

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rini Sardi**
Jabatan : **Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rini Sardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.065.232.000,-
2.	Manajemen Mutu	161.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	170.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2025		4.396.232.000,-

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rini Sardi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUPUT BULANAN												
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	
SK 1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		15.760.000	Persen	70	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70	
			a	Sertifikasi Cara Budiaya Ikan Yang Baik (CBIB)																
			b	Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)																
			c	Sertifikasi CPIB Kapal																
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		13.800.000	Persen	70	-	-	70	-	-	70	-	-	70	-	-	-	70
			a	Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)																
			b	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)																
			c	Sertifikasi HACCP																
		3	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		4.500.000	Lokasi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			a	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik																
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		1.800.000	Persen	99	-	-	99	-	-	99	-	-	99	-	-	-	99
a	Evaluasi penerbitan HC																			
SK 2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		20.500.000	Nilai	75	-	-	75	-	-	75	-	-	75	-	-	75	
			a	Penguatan sistem manajemen mutu laboratorium penguji																
		6	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		9.500.000	Nilai	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
			a	Penguatan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi																
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		24.296.000	Nilai	92	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	92	
			a	Layanan manajemen keuangan																
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		27.682.000	Nilai	71,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
			a	Layanan Perencanaan dan Penganggaran																
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		6.000.000	Persen	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			a	Layana pemberkasan dokumen persuratan dan kearsipan																
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)		28.600.000	Indeks	87	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-	87
			a	Monitoring data kehadiran dan SKP																
		11	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup satker Stasiun KIPM Padang		24.241.000	Nilai	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
			a	Layanan organisasi dan tatakelola internal																
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Padang		8.000.000	Persen	85	-	-	85	-	-	85	-	-	85	-	-	-	85
			a	Layanan penyelenggaraan kearsipan																
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		27.768.000	Persen	76	-	-	76	-	-	76	-	-	76	-	-	-	76
			a	Penyusunan RK BMN																
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		15.000.000	Persen	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
			a	Maintenance Zona Integrritas (ZI)																
15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang		12.400.000	Nilai	88	-	-	88	-	-	88	-	-							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUPUT BULANAN											
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Padang Pariaman, 6 Februari 2025
 Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu
 dan Keamanan Hasil Perikanan Padang,



Rani Sardi, S.Pi



SKIPM Padang